



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

NOTULENSI RAPAT TIM PELAKSANA EITI INDONESIA

TEMPAT : Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung Ali Wardhana , Kantor Kemenko
Bidang Perekonomian , Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta
HARI DAN TANGGAL : Rabu, 15 November 2017
WAKTU : Jam 13.30 - Selesai
AGENDA : Pembahasan Penyelesaian Laporan EITI 2015 dan Laporan Commodity
Trading
PESERTA YANG HADIR :

PT Pertamina (Persero) :	1. Ernie Ginting 2. Yogi Utomo
Dinas ESDM Provinsi Riau :	1. Rudy Hartono
Perkumpulan IDEA - CSO :	1. Tenti NK
Ditjen Bina Keuda Depdagri :	1. Febrian Arham 2. A.S. Rahayu
BPKP :	1. Sri Mahidas Tuti 2. Nurussa'Ada
SPRM-ISC Pertamina:	1. P.Jaya 2. Yunizri 3. Nyoman Sueta 4. Arinda DA
Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu :	1. Sigit H
DBH-DitjenPerimbangan Keuangan :	1. Satriyo Ari Raharjo 2. Yuni Ariani
APBI-ICMA :	1. Hendra Sinardia 2. Marvin Gilbert
API-IMA :	1. Syahrir AB
PNBP-Ditjen Anggaran Kmenkeu :	1. Seprina Hasan E 2. Robby Martapura
PWYP :	1. Asri Nuraeni 2. Aryanto 3. Rico Gunawan
SKK Migas :	1. Sondang Maria M 2. Musfadillah Daulay 3. Runi Nariswari 4. Bayu Alfa Ariyanto
Biro Administrasi Perekonomian Prov. Jatim :	1. Tuti Asri H 2. Macra Dwiana NS 3. Usniyah
Ditjen Pajak, Kemenkeu :	1. Ahmad Zaky Zamani

Article 33 Indonesia - CSO	<ol style="list-style-type: none"> 2. Wira S 1. Ermy Ardhyanti
Sekretariat EITI Kemenko Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Bastian Halim 2. Agus Haryanto 3. Edi Effendi Tedjakusuma 4. Ronald Tambunan 5. Venta Adrian 6. Agus Trianto 7. Donny Erlangga 8. Agus Prasetyono
IA Parker Randall	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ade Ikhwan 2. Dessi Yuliana 3. Achmad Zamroni 4. Asrini Wiranti 5. Gemi Ruwanti 6. Muhammad Enstein Widodo 7. Angga Hergunowo 8. Vega Valentina

A. PEMBUKAAN

- Rapat Tim Pelaksana dipimpin oleh Asdep Industri Ekstraktif, selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif mewakili Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, dengan menyampaikan point-pont agenda pembahasan sebagai berikut :
 - Pembahasan *Draft Laporan EITI 2015*
 - Pembahasan *Laporan Transparansi Commodity Trading*

B. PEMAPARAN

1. **Draft Laporan EITI 2015**, oleh Bpk Ade Ikwon, Ibu Dessi, Ibu Gemi Selaku Konsultan IA , dalam pemaparan disampaikan sebagai berikut :
 - a. **Pemaparan Oleh Bpk Ade Ikwon**
 - Disampaikan mengenai perkembangan hasil penyusunan laporan EITI 2015 per tanggal 2 November 2017
 - Isu dan rekomendasi yang terkait dengan pemerintahan yang ada pada lingkungan kegiatan Industri ekstraktif
 - Status progress penerimaan laporan dari 9 entitas pemerintah, 69 perusahaan KKKS dan 98 Perusahaan mitra KKKS
 - Entitas pemerintah ; 7 sudah melapor , 2 belum melapor (Data detil terlampir)
 - Entitas perusahaan KKKS ; 64 sudah melapor, 5 belum melapor (2 Pailit, 3 enggan melapor) (Data detil terlampir)
 - Entitas perusahaan Mitra KKKS ; 88 sudah melapor, 10 belum melapor (Data detil terlampir)
 - Status progress rekonsiliasi terkait dengan lifting oil dan gas
 - Kontribusi total PNBK 64 perusahaan KKKS yang sudah melapor yaitu USD 8.453.670.000 (99,3% terhadap total PNBK Migas)
 - Adapun Total PNBK Migas yaitu USD 8.507.219.000
 - Hal-hal yang memerlukan persetujuan anggota tim pelaksana

- Isu-isu rekonsiliasi di sektor migas
 - Informasi participating interest dan pergantian operator yang tidak up to date
 - Turunnya harga minyak dunia menyebabkan beberapa perusahaan pailit dan perubahan manajemen
 - Proses otorisasi manajemen perusahaan yang memakan waktu
 - Banyak perusahaan migas yang tidak melengkapi LO pajak dikarenakan tahun2 sebelumnya tidak ada mekanisme pembukaan data pajak
 - Tidak ada sangsi bagi perusahaan yang tidak melapor
- Respon lambat pada beberapa entitas pemerintah sering terkendala birokrasi berkaitan

b. Pemaparan Oleh Ibu Dessi

- Disampaikan mengenai perkembangan hasil penyusunan laporan Kontekstual EITI 2015
- Kesesuaian pembahasan laporan EITI 2015 dengan ketentuan standar EITI 2016 dalam bentuk matrik, dengan bagian-bagian pembahasan antara lain sbb :
 - Kerangka hukum, peraturan, kebijakan fiskal, dan reformasi yang dilakukan pemerintah
 - Informasi kadaster , pengungkapan isi kontrak dan izin, beneficial ownership
 - Pembahasan badan usahan milik negara (BUMN)
 - Aktifitas eksplorasi, data produksi, ekspor
 - Pengungkapan penerimaan Pajak dan PNBP
 - Bagian pemerintah yang diterima secara in-kind, Fee Transportasi
 - Pembayaran langsung ke daerah(PDRD) dan transfer ke daerah (DBH)
 - Biaya social yang diwajibkan oleh undang-undang, regulasi CSR
 - Kontribusi Ekstraktif pada perekonomian
- Isu-isu penting lainnya, seperti :
 - Implementasi divestasi saham
 - Akurasi pelaporan dan pembayaran PNBP
 - Artisanal and small scale mining dan pertambangan illegal
 - Peran pemerintah daerah pada proses rekonsiliasi perhitungan DBH.
 - Peraturan skema gross split, status pembenahan IUP melalui CnC
 - Rencana pembentukan holding BUMN di sektor Migas dan Minerba

c. Pemaparan Oleh Ibu Gemi

- Mengenai perkembangan hasil penyusunan laporan rekonsiliasi EITI 2015 di sektor minerba per 2 november 2017
- Status progress penerimaan laporan dari 9 entitas pemerintah dan 123 perusahaan minerba
 - Entitas pemerintah ; 7 sudah melapor , 2 belum melapor (Data detil terlampir)
 - Entitas perusahaan ; 81 sudah melapor, 42 belum melapor (Data detil terlampir)
- Status progress rekonsiliasi terkait dengan nilai pembayaran royalti, PHT dan Landrent
 - Kontribusi total PNBP 81 perusahaan yang sudah melapor yaitu Rp. 25.294.046.000.000 (91,49% terhadap jumlah sampel ; 85,36% terhadap total PNBP pertambangan)
 - Kontribusi total PNBP 123 perusahaan sampel yaitu Rp.27.645.510.000.000
 - Adapun Total PNBP Pertambangan yaitu 29.631.672.000.000
- Isu-isu rekonsiliasi di sektor minerba
 - Informasi database perusahaan yang tidak lengkap dan tdk up to date
 - Respon lambat pada beberapa entitas pemerintah sering terkendala birokrasi berkaitan dengan disposisi surat pengisian pelaporan EITI di internal institusi pemerintah sendiri
 - Belum seluruh setoran menggunakan NTPN, sehingga menyulitkan verifikasi
 - Tidak adanya sangsi bagi perusahaan yang tidak melapor

2. Pemaparan Laporan Transparansi Commodity Trading Oleh Pertamina dan Sekretariat EITI Indonesia

Mengawali pembahasan agenda Laporan Commodity Trading, bapak Edi Effendi menjelaskan mengenai latar belakang masuknya aspek Commodity Trading dalam Laporan EITI Indonesia 2015, antara lain karena salah satu requirements dalam Standard EITI 2016. Selain itu disampaikan juga bahwa pada tanggal 3 November 2017, Sekretariat EITI Indonesia telah mengadakan rapat awal pembahasan Pilot Commodity Trading dengan perwakilan dari SKK Migas, PT Pertamina (Persero) dan CSO-PWYP bertempat Ruang Rapat Kantor Sekretariat EITI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Beberapa hal yang disepakati dalam rapat tersebut adalah :

- Usulan untuk disampaikan ke ISC PT Pertamina (persero) mengenai permintaan data transaksi pengiriman yang disampaikan datanya 3 transaksi detail pengiriman terbesar per bulan sehingga setahun ada sekitar 36 transaksi
- Untuk dapat memberikan respon atas formulir isian mengenai Laporan Commodity Trading, pihak PT Pertamina (Persero) akan membahasnya terlebih dahulu dengan pihak manajemen.
- Hasil pembahasan internal PT Pertamina (Persero) mengenai Laporan Commodity Trading, akan disampaikan dalam Rapat Tim Pelaksana EITI pada tanggal 15 November 2017

C. PEMBAHASAN, TANGGAPAN DAN MASUKAN

Pembahasan, tanggapan dan masukan dari para peserta rapat, terangkum sebagai berikut :

1. Pembahasan Penyelesaian Laporan EITI 2015

- Tanggapan Pak Bastian - Asdep Industri Ekstraktif :
 - Perusahaan Minerba khususnya perusahaan batubara, yang paling banyak tidak menyampaikan laporan, apa jalan keluar yang dapat diupayakan oleh APBI?
 - Kepada Independent Administrator diminta agar betul-betul memperhatikan dalam pembahasan participating interest sektor migas, pembentukan perusahaan holding minerba serta pembahasan mengenai tambang rakyat.
 - Secara keseluruhan penyelesaian Laporan EITI 2015 yang dipaparkan hari ini sudah mendekati final.
- Tanggapan Pak Hendra Sinadia - APBI :
 - Banyaknya perusahaan minerba yang tidak menyampaikan laporannya umumnya disebabkan oleh adanya perubahan PIC di perusahaan tersebut.
 - Sebagian perusahaan yang tidak menyampaikan laporannya tersebut masuk dalam ADARO grup, akan segera dihubungi agar menyampaikan laporannya.
 - Kementerian ESDM sudah meluncurkan aplikasi untuk memantau produksi yang dapat melihat lifting bahkan pe rtiga bulan ke belakang namun untuk batubara belum bisa.
 - Keterbukaan informasi dan transparansi yang berbasis pada data dapat membantu kementerian dalam menentukan kebijakan kebijakan politis dan public.
- Tanggapan Pak Sjahrir – IMA:
 - Peran anggota MSG terkait seperti Ditjen Minerba dan Pemda yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan perusahaan minerba untuk menyampaikan laporannya.
 - Isi Laporan EITI Indonesia 2015 ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai pijakan kebijakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di sektor Minerba seperti masalah Revisi UU Minerba antara DPR dan Pemerintah yang belum kunjung selesai sejak tahun 2012, pembentukan Holding BUMN perusahaan pertambangan, menurunnya minat perusahaan pertambangan untuk melakukan kegiatan eksplorasi,

pengenaan PNBP penggunaan kawasan hutan, adanya perbedaan persepsi mengenai CSR antara perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat sekitar tambang, penyelesaian masalah IUP Clean and Clear (CNC) dan masalah penentuan (penilaian) harga Divestasi saham perusahaan minerba PMA.

- Tanggapan Pak Bastian - Asdep Industri Ekstraktif :
 - Terkait concern pak Sjahrir, saat ini sedang dilakukan berbagai langkah antara lain dengan melakukan rencana untuk membahas revisi Perpres 26/ 2010 serta UU PNBP.
- Tanggapan Pak Rudy– Dinas ESDM Pemda Provinsi Riau :
 - Bahasan mengenai komoditas Minyak dan Gas Bumi disarankan untuk dipisah.
 - Informasi mengenai akuisisi participating interest selama 2015 tidak ada di Provinsi Riau.
 - Pemda Riau berkeinginan untuk pembentukan Dana Abadi sektor Migas di Provinsi Riau seperti yang sudah dilakukan di negara Norwegia.
 - Pemda Provinsi Riau menghimbau agar Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan bisa lebih transparan mengenai data faktor pengurang dalam perhitungan DBH Migas, mengingat hal ini sudah pernah dilakukan oleh Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan (Ditjen APK) beberapa tahun yang lalu.
- Tanggapan Ibu Tuti - Biro Perekonomian Sekda Provinsi Jatim :
 - Keterlambatan Laporan EITI 2015 Provinsi Jawa Timur disebabkan adanya pergantian pejabat yang menangani Laporan EITI 2015 dan juga adanya proses birokrasi disposisi yang membutuhkan waktu untuk sampai ke Instansi terkait.
 - Di usulkan untuk kedepannya dalam penyampaian surat dicantumkan c.q. ke instansi yang terkait seperti : Dinas ESDM dan Disependa
- Tanggapan Pak Aryanto – PWYP :
 - Sepakat dengan apa yang menjadi concern atau usulan dari pak Sjahrir.
 - Berbagai upaya perbaikan sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak meskipun belum terbit peraturan yang spesifik mengaturnya misalnya adanya surat Edaran Dirjen Minerba tertanggal 25 Oktober 2017 yang mewajibkan perusahaan untuk menginformasikan BO perusahaannya. IA supaya bisa membahas perkembangan tersebut.
 - Perlu ada kesamaan pemahaman antara Pemda dan PSC mengenai pengertian *Participating Interest*.
 - Terkait Keterbukaan Kontrak, sudah ada Keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) bahwa isi Kontrak di sektor Pertambangan (KK dan PKP2B) harus dapat dibuka, tidak hanya sebagian.
 - Rekomendasi Laporan EITI 2015 harus lebih tegas dan jelas misalnya terkait isu PNBP dari Royalti dan PHT.
 - Perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan EITI 2015 sampai batas waktu yang ditentukan agar ditinggal saja, namun perusahaan yang tidak melapor tersebut agar di infokan kepada K/L terkait seperti KPK, Kantor Staf Presiden (KSP) dan Stranas KPK, maupun Pemda dimana perusahaan tersebut beroperasi.
- Tanggapan Bu Ermy – Article 33 :
 - Istilah-istilah yang tidak pas perlu dikoreksi seperti istilah “Artisanal Mining (AR)” karena AR bukanlah entitas bisnis.
- Tanggapan Pak Zaki – Ditjen Pajak :
 - Kepatuhan perusahaan minerba untuk menyampaikan Laporan EITI masih perlu untuk ditingkatkan sedangkan untuk kepatuhan perusahaan migas sudah sangat baik.
 - Ada miss persepsi dari perusahaan untuk tidak perlu lagi menyampaikan LO karena data pajak perusahaan sudah bisa diakses ke Kantor Pajak.

- Untuk memudahkan dan mengingat tengat waktu yang ada maka kalau terpaksa, LO dari perusahaan cukup soft copynya saja.
- Tanggapan Ibu Ginting – PT Pertamina (Persero) :
 - Selama ini Pertamina sudah sangat mendukung pelaksanaan EITI Indonesia.
 - Sangat berharap untuk tidak terlalu terlibat dalam proses EITI, tetapi akan sangat siap dalam penyediaan data.
- Tanggapan Bpk Robby - Ditjen Anggaran
 - Mengenai Perhitungan DBH, pada prinsipnya Ditjen Anggaran terbuka dan transparan.
 - Ditjen Anggaran akan mengungkapkan faktor pengurang jika ada surat permintaan resmi dari instansi-instansi terkait, termasuk pemda.
 - Pemda tidak ikut rekonsiliasi lagi karena adanya restrukturisasi organisasi di kementerian keuangan dari DJAPK menjadi DJPK dan DJA.
- Tanggapan Runi – SKK Migas :
 - Kepatuhan perusahaan migas dalam menyampaikan Laporan EITI menjadi catatan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan perpanjangan Wilayah Kerja (WK) Migas.

2. Pembahasan, Tanggapan dan Masukan Laporan *Commodity Trading*

- Tanggapan Pak Edi – Sekretariat EITI
 - Pada kesempatan rapat kali ini pak Edi Effendi Tedjakusuma kembali menanyakan mengenai perkembangan usulan permintaan data yang sudah disampaikan pada rapat sebelumnya dengan pihak Pertamina, SKK Migas dan CSO, yaitu apakah bisa disepakati permintaannya berupa 3 transaksi detail pengiriman terbesar per bulan sehingga setahun ada sekitar 36 transaksi yang detail sesuai dengan template laporan yang sdh disampaikan
- Tanggapan Ibu Ginting – PT Pertamina (Persero):
 - Kedalaman bisnis Commodity Trading perlu clear lebih dulu dalam data-data yang tercantum dalam formulir isian yang akan disampaikan kepada PT Pertamina (Persero).
 - Terkait permintaan data Commodity Trading, perlu dilakukan melalui surat resmi.
 - Commodity Trading sifatnya kontrak (bussines to bussines), sehingga perlu dilakukan diskusi internal lebih dahulu termasuk dengan pihak partner bisnisnya untuk dapat dilaksanakan.
- Tanggapan Bpk Nyoman – ISC PT Pertamina (Persero) :
 - Permintaan data tersebut sudah disampaikan ke pimpinan, namun arahan pimpinan terkait permintaan tersebut akan dibahas dan dirapatkan dulu di internal perusahaan
 - Yang berhak mengeluarkan data adalah Sekretaris Perusahaan (corporate secretary), dan selama ini data dari sekretaris perusahaan sifatnya tertutup, sehingga perlu untuk didiskusikan lebih dahulu.
 - Data yang diminta oleh Sekretariat EITI terlalu detail, sehingga untuk dapat memenuhinya perlu dilakukan terlebih dahulu perubahan kebijakan perusahaan. Untuk data-data yang bersifat global mungkin dapat dipenuhi.
- Tanggapan Bpk Bayu – SKK Migas :
 - Terkait dengan masalah penjualan SKK migas, laporan yang akan disampaikan tidak ada masalah bahwa jual putus, untuk minyak-minyak yang kilang , karena penentuan harga bersifat krusial jadi tidak dibuka di public, sehingga harga di tentukan secara dua belah pihak, sebab untuk harga minyak bagian negara di tentukkann dengan proses yang disesuaikan dengan laporan.

- Tanggapan Bpk Bastian – Asdep Industri Ekstraktif :
 - Apakah ada kebutuhan minimal untuk pemenuhan data dalam rangka Laporan Pilot Commodity Trading

- Tanggapan Bpk Edi Effendi – Sekretariat EITI :
 - Eksport migas pemerintah sangat kecil sehingga diusulkan untuk memasukkan data import karena lebih besar sehingga dapat mencerminkan kondisi perdagangan minyak Indonesia akan tetapi pada rapat yang lalu ISC belum setuju
 - Atas permintaan EITI Internasional pak Montty setuju, sehingga untuk formalnya dibuatkan surat permintaan ke Pertamina, akan tetapi setelah dilihat templatnya yang sangat detail perlu disepakati seberapa banyak data yang akan dilaporkan.
 - Diusulkan data yang disampaikan adalah data 3 transaksi detail pengiriman terbesar per bulan untuk setiap tahun.

- Tanggapan Bpk Aryanto – CSO - PWYP :
 - Perlu persamaan persepsi terkait dengan data yang diminta, untuk itu perlunya pihak ISC bisa menyampaikan bagaimana proses bisnis ISC yang ada saat ini dan apa perbedaannya dengan yang dulu, sehingga masyarakat paham terkait kepentingan Pertamina.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Rapat Menyetujui Draft Laporan EITI 2015 termasuk jadwal tahapan penyelesaian Laporan EITI 2015 yang telah dipaparkan oleh Konsultan Independent Administrator (IA)
2. Tim Pelaksana menyetujui permintaan IA untuk mengusahakan perusahaan dan instansi pemerintah/lembaga yang belum menyampaikan laporan EITI 2015 khususnya perusahaan minerba untuk closing datanya tanggal 20 November 2017
3. Masukan dan saran dari anggota tim pelaksana akan ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam Draft Final Laporan EITI 2015.
4. Permintaan data dan informasi laporan transparansi commodity trading sesuai dengan template yang diminta dengan usulan 3 data transaksi detail penerimaan terbesar tiap bulannya akan disampaikan oleh perwakilan Pertamina yang hadir untuk dibahas dan dimintakan persetujuannya di internal perusahaan PT. Pertamina (Persero) dan hasilnya akan disampaikan dalam Ratimlak 5 Desember 2017.

Jakarta, November 2017

Mengetahui,

An. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif

Ahmad Bastian Halim
Asisten Deputi Industri Ekstraktif
Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif